

Rencana Kerja (RENJA)
2026
Dinas Sosial



KABUPATEN TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026 telah disusun.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan, dan target program kegiatan yang disusun sebagai dokumen awal penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026.

Menggala, Nopember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan di bidang Sosial yang memperhitungkan skala prioritas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial bertumpu pada tugas pokok dan fungsi, Undang-undang di bidang Sosial serta adanya peluang dan tantangan di bidang Sosial. Hal ini selaras dengan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu persyaratan umum

yang harus dipenuhi adalah Didalam Renja Dinas Sosial dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang. Berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dan sasaran juga berpedoman pada:

1) Ideologi Pancasila

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Landasan konstitusional :

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 3) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
- a). Pro-Budaya/Pro-Culture;
 - b). Pro-Pertumbuhan/Pro-Growth;
 - c). Pro-Tenaga Kerja/Pro-Job;
 - d). Pro-Rakyat Miskin/Pro-Poor;
 - e). Pro-Lingkungan/Pro-Environment;
 - f). Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan/ Pro Low Enforcement.

Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya.

1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja disusun dengan Maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial.

b. Tujuan

Adapun Tujuan Renja SKPD untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan Dinas Sosial dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

B A B V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renja Tahun 2025 Dinas Sosial terdiri dari 1 (Satu) program dan 2 (dua) kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial dengan 2 Kegiatan

Adapun Form Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2026 ini pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)*
Kabupaten Tulang Bawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.06.01	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</i>								
1.06.01.2 .02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 org	39 org	39 org	39 org	39 org	39 org	39 org	39 org
2.11 . 01. 2 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org

2.11 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
2.11 . 01. 2. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.11 . 01. 2. 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
2.11 . 01. 2. 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN
2.11 . 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.11 . 01. 2. 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN	24 LAPORAN
2.11 . 01. 2. 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

2.11 . 01. 2 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT	6 UNIT
2.11 . 01. 2 . 09 . 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>		100	100	100	100	100	100	100	100
1 06 04 2.02 0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT	50 UNIT
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>									
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 ORG	19 ORG	19 ORG	19 ORG	19 ORG	19 ORG	19 ORG	19 ORG

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman makam Pahlawan Kabupaten/Kota	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM	17 MAKAM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	166 ORG	166 ORG	166 ORG	166 ORG	166 ORG	166 ORG	166 ORG	166 ORG
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>									
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								

Pengukuran kinerja Dinas Sosial didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran :

"Menurunnya angka kemiskinan"

Sedangkan sebagai indikator utama adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7.27
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui tertib administrasi Dinas Sosial kabupaten Tulang Bawang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Nilai/Predikat SAKIP Dinas Sosial	BB

Berdasarkan Form Rekapitulasi Tabel di atas, dapat disimpulkan hal – hal antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Dalam Tabel ini Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah semua Program/ Kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; Implikasi yang timbul adalah dengan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan salah satu program/kegiatan di atas maka penyerapan anggaran belanja langsung menjadi lebih kecil.
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah berkoordinasi dengan Satker terkait sehingga penganggaran sesuai dengan perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Tingkat keberhasilan pelayanan bisa dilihat dari indikator sasaran, target dan realisasi capaian kinerja. Indikator sasaran yang tidak tercapai karena belum adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena belum adanya dukungan anggaran.

Layanan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam hal

ini penyaluran bantuan bagi lansia, bantuan bagi lansia, pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin serta penyaluran beras bagi anak yatim. Yang merupakan penjabaran 25 program unggulan Bergerak Melayani Warga (BMW).

Adapun Form Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2025 ini pada Tabel 2.2.

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung, 2023–2024

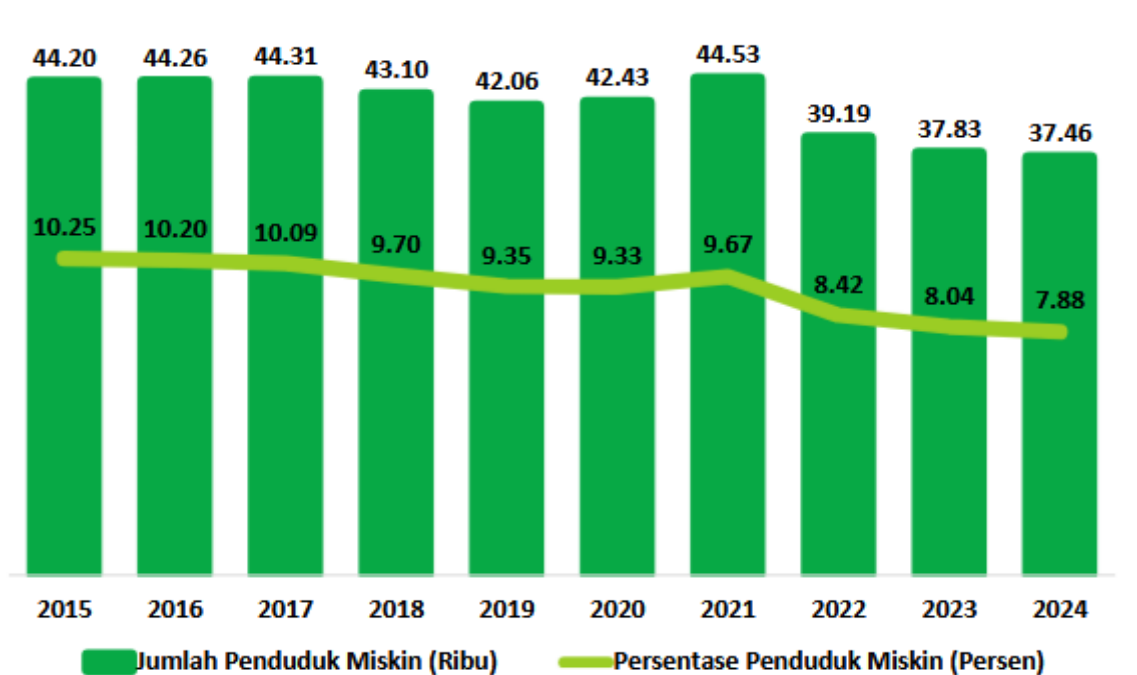
Daerah	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
Kabupaten Tulang Bawang	37,83	37,46
Provinsi Lampung	970,67	941,23
Persentase Penduduk Miskin		
Kabupaten Tulang Bawang	8,04	7,88
Provinsi Lampung	11,11	10,69

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 mencapai 37,46 ribu orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,37 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,88 per-sen, turun 0,16 poin dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan angka provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang (7,88 persen) masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencapai 10,69 persen di bulan Maret 2024. Dan pada tahun 2022 dan 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada table berikut

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2024

Secara umum, pada periode 2015-2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami penurunan dari angka 10,25 persen menjadi 7,88 persen. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang. Kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan adanya pembatasan mobilitas penduduk saat pandemik covid-19 yang melanda sampai di Kabupaten Tulang Bawang. Namun demikian dari tahun 2021 sampai 2024, kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan kembali. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2024 disajikan pada gambar berikut.



Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin yang dihasilkan dari penjumlahan. Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Seorang penduduk dikatakan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dari tahun 2015 sampai 2024 garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp337.167,00 perkapita perbulan meningkat menjadi Rp560.324,00 perkapita perbulan pada tahun 2024.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Provinsi/Kabupaten/Kota Tulang Bawang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menurunnya Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	78,55	100%	100%	100%	67,50%		100%	100%	
			Persentase korban bencana yang menrima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	91,89	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
			persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80,67	100%	100%	100%	44,24%		100%	100%	
2	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui tertib administrasi	Nilai/Predikat Sakip Dinas Sosial	B	B	B	B	B		B	B	

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2025

NO.	NAMA PORGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	
				Rp.	%
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.180.422.000,-	115.297.000	9,77
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	846.595.000	724.401.900	85,57
		Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	263.552.000	124.716.500	47,32
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial			
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	1.832.503,203	1.576.596,200	86,04
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.403.836.408	3.134.216,053	92,08
			7.508.755.016	5.675.227,653	75,40

Tabel 2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Realisasi (Rp)	% (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	3.910.543.000	

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp. **7.526.909.008,-** terealisasi sebesar Rp. **5.675.227,635,-** atau **75,40%** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.403.836,408,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.134.216,053,- atau 92,08 %, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. **Rp 0,-**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial utamanya dalam melaksanakan pelayanan SKPD mengalami permasalahan dan hambatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. intern

1. Minimnya sarana dan prasarana;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latarbelakang pendidikan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial dan yang mengetahui dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
3. Rendahnya kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat tentang kesejahteraan social.

b. Ekstern

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di masyarakat.
2. Masih kurangnya SDM yang menjadi tenaga pekerja sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan sosial melalui Lembaga –lembaga kesejahteraan sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada Serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial maka ada 3 strategi inti yang ditekankan pada

rentang waktu capaian lima tahun : *Pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS/PMKS, *Kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya – upaya kesejahteraan perorangan, kelompok, masyarakat dan dunia usaha. *Ketiga*, Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PPKS/PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Isu Strategis berdasarkan Kelompok sasaran :

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Disabilitas
4. Korban Bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Sosial dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Adapun Form Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2025 ini pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota Tulang Bawang*

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Tulang Bawang	Persentase Penduduk Miskin	7.27		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Tulang Bawang	Persentase Penduduk Miskin	7.27		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Tulang Bawang				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Tulang Bawang				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tulang Bawang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)	100%	4.523.545.300	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tulang Bawang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)	100%	4.523.545.300	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tulang Bawang	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Sosial Tunai bagi lansia dan Penyandang Disabilitas dan alat bantu Diabitiitas, serta Santunan Beras Anak Yatim, Meningkatnya Pengetahuan Pelajar Akan Bahaya Narkoba,	100%	2.082.422.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tulang Bawang	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Sosial Tunai bagi lansia dan Penyandang Disabilitas dan alat bantu Diabitiitas, serta Santunan Beras Anak Yatim, Meningkatnya Pengetahuan Pelajar Akan Bahaya Narkoba,	100%	1.432.830.000	

	Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tulang Bawang	Meningkatnya kemampuan KPM PKH, TAGANA, Santunan Uang duka, Pendampingan BPNT	100%	263.552.000	Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tulang Bawang	Meningkatnya kemampuan KPM PKH, TAGANA, Santunan Uang duka, Pendampingan BPNT	100%	15.996.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Tulang Bawang				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Tulang Bawang				
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	Tulang Bawang	Meningkatkan Kualitas pelayanan TKSK dan PSM, Terpeliharanya Monumen Kepahlawanan (TMP), Terpeliharanya Islamic Center, Terlaksananya pengajian akbar	166 org	775.890.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	Tulang Bawang	Meningkatkan Kualitas pelayanan TKSK dan PSM, Terpeliharanya Monumen Kepahlawanan (TMP), Terpeliharanya Islamic Center, Terlaksananya pengajian akbar	166 org	1.717.503.200	
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tulang Bawang				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tulang Bawang				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 org	3.598.212.016	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 org	3.423.836.408	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Belum Ada Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dari Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan dilaksanakannya, antara lain :

1. Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pendampingan dan fasilitasi pihak-pihak terkait baik Pembina maupun evaluator;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Sosial Tulang Bawang sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota Tulang Bawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social				
	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Tulang Bawang			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tulang Bawang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tulang Bawang	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Sosial Tunai bagi lansia dan Penyandang Disabilitas dan alat bantu Diabitiitas, serta Santunan Beras Anak Yatim, Meningkatnya Pengetahuan Pelajar Akan Bahaya Narkoba,	2325 org	
	Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tulang Bawang	Meningkatnya kemampuan KPM PKH, TAGANA, Santunan Uang duka, Pendampingan BPNT	100%	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Tulang Bawang			
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	Tulang Bawang	Meningkatkan Kualitas pelayanan TKSK dan PSM, Terpeliharanya Monumen Kepahlawanan (TMP)	166 org, 1 TMP	
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Tulang Bawang	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tulang Bawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 org	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2025 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program- program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2025 adalah *"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"*. Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2026 tersebut, maka Prioritas Nasional Tahun 2026 adalah:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Point Bab II Bagian 2.3 mengenai Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD bahwa Isu-isu Strategis Nasional Sosial adalah mengenai Pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS/PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan

Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan. Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Adapun Tujuan Renja adalah arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang Renja SKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Terwujudnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tulang Bawang
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial
5. Terciptanya peranan Masyarakat dan Lembaga kesejahteraan sosial

dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan social

6. Terciptanya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social bagi PPKS.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program yang mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi/Kabupaten/Kota Tulang Bawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun. 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>							
1.06.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota								
1.06.01	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</i>			3.835.831.192	APBD			3.835.831.192
1.06.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tulang Bawang	39 org	3.539.361.192			39 org	3.539.361.192
2.11 . 01. 2 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tulang Bawang	46 ORG	296.470.000			46 ORG	296.470.000
2.11 . 01. 2. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.935.600	APBD			28.935.600
01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tulang Bawang	6 DOK	18.935.600			6 DOK	28.935.600

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.572.050	APBD		60.572.050
2.11 . 01. 2 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tulang Bawang	1 PAKET	1.997.000		1 PAKET	3.997.000
X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tulang Bawang	1 PAKET	5.266.400		1 PAKET	7.266.400
X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tulang Bawang	1 PAKET	2.389.250		1 PAKET	5.389.250
X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tulang Bawang	1 PAKET	8.853.400		1 PAKET	11.853.400
2.11 . 01. 2 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tulang Bawang	24 LAPORAN	22.066.000		24 LAPORAN	32.066.000
2.11 . 01. 2 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.495.000	APBD		163.495.000
2.11 . 01. 2 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tulang Bawang	24 LAPORAN	39.895.000		24 LAPORAN	39.895.000
2.11 . 01. 2 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tulang Bawang	1 PAKET	123.600.000		1 PAKET	123.600.000
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.644.000	APBD		140.644.000
2.11 . 01. 2 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tulang Bawang	6 UNIT	25.794.000		6 UNIT	25.794.000
2.11 . 01. 2 . 09 . 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Kantor yang terpelihara	Tulang Bawang	1 PAKET	14.850.000		1 PAKET	114.850.000

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.044.272.300				6.098.272.300
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>		Tulang Bawang	100	6.044.272.300			100	6.098.272.300
1 06 04 2.02 0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			15.996.000				45.996.000
1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			4.523.545.300				4.523.545.300
1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				1.432.830.000				1.432.830.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			71.901.000				95.901.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100	48.012.700			100	88.012.700
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Tulang Bawang						
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			48.012.700				88.012.700
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100%	145.674.700			100%	145.674.700
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Tulang Bawang						

1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman makam Pahlawan Kabupaten/Kota			145.674.700				145.674.700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100	595.950.000			100	595.950.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tulang Bawang		595950000				595950000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100	25.952.000			100	45.952.000
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		Tulang Bawang		25.952.000				45.952.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			25.952.000				45.952.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan.

Program kerja tidak lepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Kemudian, program kerja yang telah ditetapkan diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai sumber diantaranya berasal dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang menjadi isu terkini, dan isu strategis karena sesuai pula dengan prioritas program baik secara nasional maupun regional Kabupaten Tulang Bawang , adapun nomenklatur usulan program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah:

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai			Kadis Sosial
1.06.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	Nilai			SEKDIN
1.06.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	29	3.423.836.408	
2.11 . 01. 2 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang/ bulan	46	296.470.000	
2.11 . 01. 2 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				18.935.600	
2.11 . 01. 2. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			18.935.600	
01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOK	6	40.572.050	Sekretariat Dinsos
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.997.000	Bidang RESOS
2.11 . 01. 2 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	1	5.266.400	

X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	1	2.389.250	
X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	1	8.853.400	Bidang PEMSOS
X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	1	22.066.000	
2.11 . 01. 2 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	24	163.495.000	
2.11 . 01. 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.895.000	
2.11 . 01. 2 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	24	123.600.000	
2.11 . 01. 2 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PAKET	1	40.644.000	
X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.794.000	
2.11 . 01. 2 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	UNIT	6	14.850.000	
2.11 . 01. 2 . 09 . 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Kantor yang terpelihara	PAKET	1		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.889.272.300	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		orang		6.889.272.300	

1 06 04 2.02 0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		15.996.000	Bidang LINJAMSO S
1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		5.368.545.300	Bidang PEMSOS
1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				1.432.830.000	Bidang RESOS
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	50	71.901.000	Bidang RESOS
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				48.012.700	
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	org	19	48.012.700	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				145.674.700	Bidang PEMSOS
1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	17	145.674.700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				595.950.000	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	166	595.950.000	Bidang PEMSOS
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				25.952.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				25.952.000	Bidang FM
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	25.952.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Sosial merupakan penjabaran dan rencana strategis RPJMD periode 2025-2029 disinkronkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Lampiran VI tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial Tulang Bawang Tahun 2026 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung

oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Renja-SKPD yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang sosial sesuai visi misi Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya dan Dinas Sosial pada khususnya.

Menggala, 25 Nopember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003